



**PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN PELEDAKAN PENDUDUK SEBAGAI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1992
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA**

(Studi Kasus di Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum**



PERPUSTAKAAN	No. INV.	486 / S / FH / CI
	Th. ANGG.	Cat :
	PARAP.	TGL. 19-01-04

Disusun Oleh :

**Nama : ATIEK ARIANASARY
NIM : 96.20.1386
NIRM : 96.6.111.01000.50067**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2003**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN PELEDAKAN PENDUDUK SEBAGAI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1992
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
(Studi kasus di Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)**

SKRIPSI

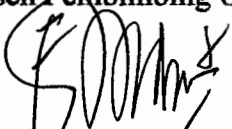
Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : ATIEK ARIANASARY
NIM : 96.20.1386
NIRM : 96.6.111.01000.50067

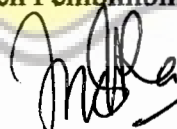
Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama



ENDANG WAHYATI, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Kedua



YOVITA INDRAYATI, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2003**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : ATIEK ARIANASARY

NIM : 96.20.1386

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 September 2003

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Endang Wahyati Y., SH. MH. (.....)
2. Yovita Indrayati, SH. M. Hum (.....)
3. Hotmauli Sidabalok, SH. CN. M. Hum (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



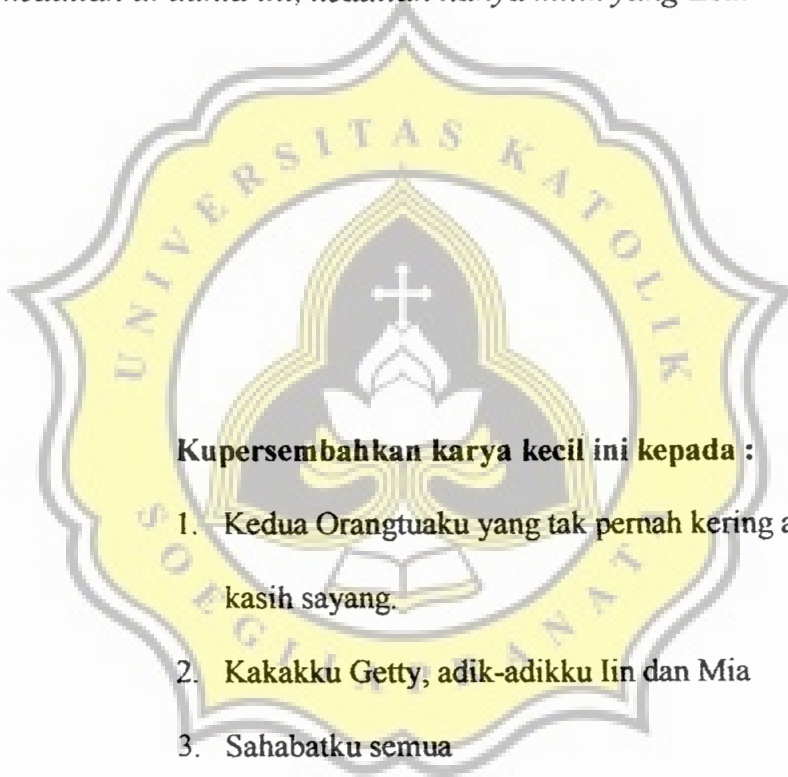
(Y. Budi Sarwo, SH. MH.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Tetaplah antusias karena itu yang akan merubah hidupmu, hanya orang-orang yang antusias saja yang dapat merubah hidup.*
- ❖ *Keadilan itu hanyalah ilusi para pemabok, maka jangan pernah mengharapkan keadilan di dunia ini, keadilan hanya milik yang Esa.*



Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

1. Kedua Orangtuaku yang tak pernah kering akan kasih sayang.
2. Kakakku Getty, adik-adikku Iin dan Mia
3. Sahabatku semua
4. Almamater '96

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : **“PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PELEDAKAN PENDUDUK SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA (Studi kasus di Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992.tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera dan pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam mengatasi peledakan penduduk di Kota Semarang serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan Keluarga Berencana di Kota Semarang dan cara mengatasinya.

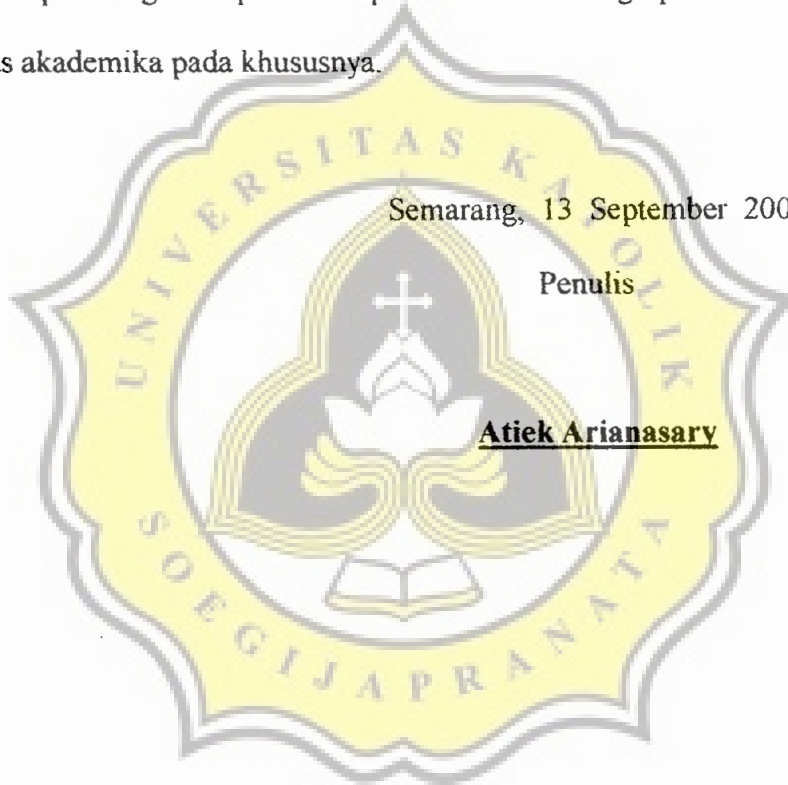
Penulis menyadari bahwa penulisan di dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik

dan saran yang membangun dari pembaca. Tidak lupa dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y Budi Sarwo, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak V. Hadiyono, SH. MHum., selaku Dosen Wali yang telah mendorong dan mengarahkan serta memberikan spirit dan motivasi untuk terus maju dalam mengembangkan karier dan pendidikan di Kampus tercinta
4. Ibu Endang Wahyati, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Yovita Indrayati,SH. MHum, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Usman Budi Raharjo, SH selaku Kepala Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur yang telah memberikan ijin dan membantu melengkapi data-data kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan staff pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Kedua orang tua yang tak pernah kering oleh kasih sayang, yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

9. Keluarga besar Drs. Soepriyadi MPd, di Pamularsih, terima kasih telah memberikan dorongan 'n do'a yang gak bisa penulis lupakan
10. Kru McD mal Ciputra, Mas Zani, Heni, Etik, Widya, Ucik, Ateng, Catur, gendut Mike and Bernard, si hitam mungil yang selalu setia menemaniku.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penduduk dan Kependudukan	11
1. Pengertian Penduduk	11
2. Macam-Macam Penduduk	14
3. Masalah Kependudukan	15

	B. Program Keluarga berencana	17
	1. Pengertian Keluarga Berencana	17
	2. Keluarga Berencana dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992	19
	C. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kependudukan	21
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	25
	B. Spesifikasi Penelitian	26
	C. Metode Pengumpulan Data	26
	D. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian	28
	E. Metode Penyajian Data	28
	F. Metode Analisis Data	29
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Semarang	30
	1. Gambaran Umum Tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Semarang	30
	2. Wilayah Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Semarang	31
	3. Data tentang Penduduk	33

B. Gambaran Umum Obyek Penelitian	38
1. Sejarah Kelurahan Sarirejo	38
2. Keadaan Demografi Kelurahan Sarirejo	39
3. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sarirejo	40
4. Agama yang Dianut Penduduk Kelurahan Sarirejo	41
5. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Sarirejo	41
C. Pembahasan	
1. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	62
2. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam Mengatasi Peledakan Penduduk di Kota Semarang	66
3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya dan cara Mengatasinya.....	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Salah satu konsep yang dikembangkan berkaitan dengan program Keluarga Berencana (KB) Nasional adalah pembentukan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Dengan konsep ini Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkepentingan untuk mensukseskan konsep tersebut, dalam rangka pembangunan jangka panjang kedua sesuai dengan tujuan gerakan Keluarga Berencana (KB) yaitu membudayakan norma keluarga kecil bahagia sejahtera sebagai upaya membangun warga kecil bahagia sejahtera. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PELEDAKAN PENDUDUK SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA (Studi kasus di Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)”**. Dari paparan latar belakang yang peneliti sebutkan di atas maka dapatlah dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ? bagaimana pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam mengatasi peledakan penduduk di Kota Semarang ? hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan bagaimana cara mengatasinya ?

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*) mengingat yang diteliti adalah hubungan antara faktor sosiologis dengan faktor yuridis. Faktor sosiologis merupakan faktor manusia yang ada dalam masyarakat, sedangkan faktor yuridis merupakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukumnya. Faktor yuridis di sini menekankan pada norma-norma dan peraturan-peraturan hukum tentang Keluarga Berencana dan kependudukan khususnya penyelenggaraan Keluarga Berencana. Sedangkan sosiologis di sini menekankan pada faktor empiris dengan menelaah gejala-gejala hukum berdasarkan kenyataan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat mengenai peledakan penduduk. Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif didukung dengan analisis kuantitatif, yaitu menganalisis data dengan konsep, teori dan peraturan perundang-undangan yang disusun secara induktif, teratur, urut. Data dianalisis menurut masing-masing kelompok data yang berhubungan dengan pengaturan keluarga berencana dan pelaksanaan keluarga berencana di Kota Semarang menurut masing-masing variabel.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan keluarga berencana sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera khususnya dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992. Tujuan penyelenggaraan keluarga berencana di Kota Semarang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Ibu dan Anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan mengendalikan kelahiran dan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia. Adapun bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Semarang melalui : Pendekatan kemasyarakatan, Pendekatan wilayah paripurna, Pendekatan integratif, Pendekatan desentralisasi manajemen, Pendekatan kualitatif, Pendekatan *catur bhava utama* dan Pendekatan mandiri. Melalui pendekatan tersebut di atas dimaksudkan agar program keluarga berencana mandiri dapat tersosialisasi dengan baik dan terlaksana sesuai tujuan yang hendak dicapai. Mekanisme pelaksanaan program keluarga berencana dalam mengatasi peledakan penduduk di Kota Semarang melalui fase-fase, yaitu : Fase perluasan jangkauan, Fase pembinaan, Fase pelembagaan. Pelaksanaan program KB di Kelurahan Sarirejo dilakukan secara integratif yang melibatkan masyarakat sebagai subyek program KB, tokoh masyarakat serta aparat pemerintah kelurahan dan petugas KB. Secara bertahap pelaksanaan KB di Kelurahan Sarirejo dialih kelolakan kepada masyarakat setempat sebagai wujud partisipasi. Alih kelola dilakukan dengan cara mendorong masyarakat menjadi KB mandiri, sehingga pendanaan alat kontrasepsi murni dari masyarakat sendiri. Pelaksanaan program keluarga berencana mandiri di Kelurahan Sarirejo sampai saat ini menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari proposi antara penduduk yang dapat menerima program KB, yakni sebanyak 1.532 pasangan (94,2%), sementara penduduk yang belum dapat menerima program KB sebanyak 94 pasangan (5,8%). Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan program keluarga berencana, yakni hambatan yang bersifat teknis dan hambatan yang bersifat non teknis. Hambatan teknis ini meliputi keterbatasan alat-alat kontrasepsi yang ada, sehingga belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat Kota Semarang. Tenaga penyuluhan yang ada saat ini belum mencukupi kebutuhan di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan serta belum optimalnya petugas BKKBN Kota Semarang dalam mengkomunikasikan program KB ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Sedangkan hambatan non teknis meliputi faktor kesadaran komunikasi suami isteri yang masih kurang serta faktor peran serta tokoh masyarakat yang belum optimal.